

Amandus Jong Tallo # Asep Syaiful Bahri # Lucky Nugroho # Suryani
Pebri Yanasari # Urwatul Wutsqah # Silvester Dian Handy Permana
Fitri Abdillah # Posma Sariguna Johnson Kennedy # Santi Palupi
Zakiyudin Fikri # Ady Muzwardi

Membangun Peradaban Berbasis Pariwisata

Amandus Jong Tallo, dkk.

Membangun Peradaban Berbasis Pariwisata



Membangun Peradaban Berbasis Pariwisata

**KUTIPAN PASAL 72:
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Amandus Jong Tallo # Asep Syaiful Bahri
Lucky Nugroho # Suryani # Pebri Yanasari
Urwatul Wutsqah # Silvester Dian Handy Permana
Fitri Abdillah # Posma Sariguna Johnson Kennedy
Santi Palupi # Zakiyudin Fikri # Ady Muzwardi

Membangun Peradaban Berbasis Pariwisata



Pekalongan - Indonesia

Membangun Peradaban Berbasis Pariwisata

Copyright © 2020

Penulis:

Amandus Jong Tallo # Asep Syaiful Bahri
Lucky Nugroho # Suryani # Pebri Yanasari
Urwatul Wutsqah # Silvester Dian Handy Permana
Fitri Abdillah # Posma Sariguna Johnson Kennedy
Santi Palupi # Zakiyudin Fikri # Ady Muzwardi

Editor:

Moh. Nasrudin
(SK BNSP: No. Reg. KOM.1446.01749 2019)

Setting Lay-out & Cover:

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

PT. Nasya Expanding Management
(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)

Jl. Raya Wangandowo, Bojong
Pekalongan, Jawa Tengah 51156
Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257
www.penerbitnem.com / nasyaexpanding@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, November 2020

ISBN: 978-623-6906-00-2

Kata Pengantar

Saat pra, Covid dan era new normal menjadikan tantangan bagi pengembangan sektor kepariwisataan. Menjadi kebenaran umum bahwa sektor wisata sangat terdampak akibat adanya Covid-19 sejak awal tahun 2020 hingga kini. Kekhawatiran tersebut bukan menjadi hambatan dalam berkembang, namun menjadi tantangan dalam pengembangan wisata.

Desa sebagai entitas penggerak ekonomi rakyat, sudah harus menjadi motor penggerak ekonomi wilayah. Kehadiran desa dengan berbagai potensi baik alam, budaya dan buatan, sangat mengambil peran dalam meningkatkan kepariwisataan nusantara. Aktor utama dalam pengembangan desa adalah masyarakat yang berperan baik sebagai subjek maupun objek pembangunan desa berbasis wisata.

Ragam metode yang ditawarkan buku ini dengan berbagai studi kasus dari berbagai wilayah, menjadikan kekayaan dalam kontribusi keilmuan. Pengembangan wisata di wilayah perbatas turut serta menunjukkan wajah NKRI di mata negara tetangga.

Syukur kehadiran Yang Maha Kuasa dan terima kasih buat semua. Para penulis memohon maaf jika ada perbedaan sudut pandang, semuanya dilakukan guna memajukan dunia literasi di bidang kepariwisataan. Jayalah Pariwisata Indonesia.

Jakarta , Desember 2020

Penulis

Kata Sambutan
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) Republik Indonesia

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan*

Keanekaragaman wilayah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, Sangihe Talaud dari ke Rote. Di tengah pandemic Covid-19, sektor pariwisata terus digerus dan paling terasa efeknya, untuk itu diperlukan kerja sama dan strategi yang konstruktif dalam pengembangan wisata. Buku ini sangat mengantarkan para pembaca mendalam membangun wisata dari desa berbasis masyarakat, pada sisi lain ragam alternatif wisata dan wisata berbasis teknologi menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Membangun wisata berbasis spatial, dimulai dari desa, sebagai agregat terkecil dari desa. Untuk membangun desa diperlukan informasi spatial berupa peta desa dan pembuatannya wajib bersama masyarakat. Pengembangan desa berbasis masyarakat kemudian diulas dengan membangun kelompok sadar wisata

(POKDARWIS), sebagai penggerak dalam menentukan arah dan tujuan wisata berbasis desa. Keberadaan keuangan syariah di Indonesia merupakan suatu keniscayaan, bukan saja dikarenakan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. keuangan syariah menjadi salah satu solusi bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Konsep ekonomi syariah menurut penulis tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata (*profit*), akan tetapi juga fokus terhadap aspek sosial, lingkungan dan Ilahi. Digital ekosistem memiliki peran yang vital dalam memperkuat sinergi rantai nilai industri halal dengan keuangan syariah. Merujuk pada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pada rantai nilai industri halal tersebut di atas, maka seluruh *stakeholder* perlu bekerja sama dan berkolaborasi mencari solusi dan membantu serta mendampingi agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas.

Keanekaragaman budaya juga dibahas dalam buku ini terutama terkait dengan ritual ada, yang menarik untuk dicermati. Budaya adalah bahasa komunitas yang perlu didiskusikan dengan masyarakat sehingga diperlukan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD).

Pariwisata menjadi salah satu pendapatan negara yang cukup besar dimana sektor pariwisata dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong adanya perkembangan investasi. Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan

lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Sidang Pembaca yang kami hormati,

Virtual tour sebagai alternatif wisata. Bagian lain dari sektor pariwisata yang terdampak dari pandemi Covid-19 ini adalah *tour guide* atau pemandu wisata. Bisnis *tour guide* juga memiliki tantangan yang sangat besar untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tidak sedikit *tour guide* yang gulung tikar karena tidak adanya wisatawan yang datang dan tutupnya tempat pariwisata. *Virtual tour* merupakan suatu alternatif wisata pada masa pandemi Covid-19 dengan tidak ke luar rumah. *Virtual tour* mengandalkan sarana teknologi informasi berupa internet dan komputer/*smartphone*. *Virtual tour* membawa pengalaman *virtual* bagi para wisatawan dengan melihat beberapa destinasi wisata tertentu dalam suatu kota atau suatu negara. Pengalaman wisatawan akan dijelaskan dalam buku ini lewat mendongeng sebagai salah satu tindakan *marketing* dalam pengembangan pengalaman wisatawan.

Dari perspektif pembangunan, pengembangan daerah perbatasan masih lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal, dimana fasilitas dan infrastruktur sosial dan ekonominya masih sangat terbatas. Banyak masalah yang dihadapi oleh wilayah perbatasan antarnegara di Indonesia. Pembangunan perlu dilakukan dengan memprioritaskan pendekatan kesejahteraan, lingkungan dan keamanan.

Perencanaan penerapan program *cleanliness, health and safety* (CHS) pada destinasi wisata dalam new normal di Indonesia. Pariwisata adalah salah satu sektor bisnis yang terpengaruh selama pandemi Covid-19. Secara global, periode pandemi Covid-19 belum diketahui kapan berakhir sehingga komunitas global diharapkan dapat beradaptasi untuk menerapkan gaya hidup baru. Implementasi program CHS lokasi proyek percontohan yang ditetapkan adalah Bali. Dengan mempertimbangkan Bali sebagai Destinasi wisata utama di Indonesia dan dianggap provinsi yang berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Pengembangan semua model diperlukan kerja sama secara kolaboratif, dimana setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Sukses dan Maju Pariwisata Indonesia
Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan*

Jakarta, November 2020

Dr. Wisnu Bawa Tarunajaya, M.M.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR __ v

**KATA SAMBUTAN DEPUTI BIDANG SUMBER
DAYA DAN KELEMBAGAAN KEMENPAREKRAF RI**
__ vi

DAFTAR ISI __ x

**BAB 1 MEMOTRET DESA DENGAN PEMETAAN
PARTISIPATIF (Amandus Jong Tallo)** __ 1

- A. Otonomi Wilayah Desa __ 1
- B. Bergerak Bersama Bangun Desa __ 3
- C. Pemetaan Desa Wisata __ 6

**BAB 2 MEMBANGUN DESA WISATA BERBASIS
MASYARAKAT (Asep Syaiful Bahri)** __ 19

- A. Pariwisata __ 19
- B. Tinjauan Mengenai Desa __ 22
- C. Wisata Perdesaan __ 24
- D. Desa Wisata __ 28
- E. Langkah-langkah Membangun Desa Wisata
Berbasis Masyarakat __ 30

**BAB 3 ISU, KONSEP, DAN IMPLEMENTASI BISNIS
WISATA HALAL (Lucky Nugroho)** __ 41

- A. Latar Belakang __ 41
- B. Keuangan Syariah dan Rantai Industri Halal __ 45
- C. Digital Ekosistem pada Rantai Nilai Industri Halal
__ 49

**BAB 4 TRADISI PERKAWINAN ADAT BANGKA
SEBAGAI SALAH SATU POTENSI DAYA TARIK
WISATA (Suryani) __ 61**

- A. Pendahuluan __ 61
- B. Prosesi Pernikahan Adat Bangka __ 62
- C. Daya Tarik Wisata __ 67

**BAB 5 PENDEKATAN ASSET BASED COMMUNITY
DEVELOPMENT (ABCD) DALAM PENGEMBANGAN
WISATA BERBASIS MASYARAKAT (Pebri Yanasari)
__ 73**

- A. Pendahuluan __ 73
- B. Pemberdayaan Masyarakat __ 75
- C. *Asset Based Community Development* __ 78
- D. Reboisasi dan Pemanfaatan Kolong Eks Tambang
Timah __ 81
 - 1. Strategi Pengolahan Kolong Eks Tambang
Timah __ 82
 - 2. Tahapan-tahapan Pemanfaatan Kolong Eks
Tambang Timah __ 84
 - 3. Tujuan Pemanfaatan Kolong Eks Tambang
Timah __ 85
- E. Penutup __ 87

**BAB 6 PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS
ADAT DAN BUDAYA (Urwatul Wutsqah) __ 91**

- A. Pendahuluan __ 91
- B. Produk Wisata __ 94
- C. Desa Wisata Berbasis Budaya __ 100
- D. Strategi Pengembangan Pariwisata __ 108
- E. Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata __ 113

**BAB 7 VIRTUAL TOUR SEBAGAI ALTERNATIF
WISATA (Silvester Dian Handy Permana) __ 119**

**BAB 8 STORYTELLING DALAM PENYAJIAN
KEMASAN PRODUK DESA WISATA (Fitri Abdillah)
__ 133**

- A. Prolog __ 133
- B. Desa Wisata __ 138
 - 1. Apa Desa Wisata? __ 138
 - 2. Tipologi Desa Wisata __ 140
 - 3. Produk Wisata di Desa Wisata __ 141
- C. *Storytelling* __ 142
 - 1. Dongeng dan Mendongeng? __ 142
 - 2. Jenis-jenis Dongeng __ 145
 - 3. Manfaat Mendongeng __ 146
- D. Penerapan *Storytelling* pada Produk Wisata di Desa Wisata __ 148
 - 1. *Storytelling* untuk Pengenalan Desa Wisata? __ 148
 - 2. *Storytelling* untuk Morfologi Lahan Desa __ 151
 - 3. *Storytelling* untuk Makanan dan Minuman __ 153
 - 4. *Storytelling* untuk Kerajinan Masyarakat __ 155
 - 5. *Storytelling* tentang Festival Budaya atau Upacara Adat __ 157
 - 6. Tips Penting untuk *Storyteller* di Desa Wisata __ 159
- E. Epilog __ 160

**BAB 9 WAJAH BARU PERBATASAN INDONESIA
(Posma Sariguna Johnson Kennedy) __ 167**

- A. Pendahuluan __ 167

- B. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia __ 168
- C. Contoh Kasus: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (NTT) __ 172
- D. Pengembangan Pos Lintas Batas Negara dan Pariwisata Perbatasan di Atambua, Nusa Tenggara Timur __ 177
- E. Kesimpulan __ 183

BAB 10 PENERAPAN *PROGRAM CLEANLINESS, HEALTH AND SAFETY (CHS)* PADA DESTINASI WISATA DALAM NEW NORMAL DI INDONESIA
(Santi Palupi) __ 189

- A. Pendahuluan __ 189
- B. Pembahasan __ 191

BAB 11 PENGUATAN TATA KELOLA PARIWISATA KABUPATEN BANGKA DALAM PERSPEKTIF *COLLABORATIVE GOVERNANCE* (Zakiyudin Fikri)
__ 211

- A. Latar Belakang __ 211
- B. Pertambangan Timah; Aktor, Jaringan dan Konflik Kepentingan __ 214
- C. *Colaborative Governance*; Teori dan Praktik dalam Pemerintahan __ 218
- D. Pariwisata Berkelanjutan dalam Kerangka *Collaborative Governance* __ 222
- E. Kesimpulan __ 226

BAB 12 SISTEM PENGELOLAAN PARIWISATA PERBATASAN: STUDI MANAJEMEN PARIWISATA KEPULAUAN RIAU (Ady Muzwardi) __ 231

- A. Pendahuluan __ **231**
- B. Perencanaan Pariwisata Kepulauan Riau __ **238**
- C. Perencanaan Event __ **238**
- D. Sinkronisasi Pelaksanaan Promosi __ **246**
- E. Kesimpulan __ **248**

WAJAH BARU PERBATASAN INDONESIA

Penulis: Posma Sariguna Johnson Kennedy

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang memiliki hak berdaulat menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 45). Peraturan tentang wilayah negara dimana di dalamnya termasuk wilayah daratan dan perairan, serta ruang udara di atasnya, termasuk semua sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, telah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) No.43/2008 tentang Wilayah Negara (Presiden-RI, 2008). (BNPP-RI, 2011)

Visi dan misi NKRI perlu diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat, pemerintah dan stakeholder lainnya. Visi Indonesia sebagai negara maritim merupakan langkah strategis dalam mempromosikan kedaulatan nasional yang kuat dan meningkatkan perekonomian nasional. Kombinasi ekonomi dan keamanan yang baik diharapkan dapat membuat masyarakat Indonesia yang makmur dan berdaulat. Untuk mempercepat pembangunan perlu dilakukan lompatan tinggi, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terluar) atau wilayah perbatasan Indonesia.

Sumber hukum mengenai pengelolaan wilayah dan perbatasan Indonesia diatur dalam UU-RI, termasuk dalam UU No. 26/2007 tentang Perencanaan Tata Ruang (Presiden-RI, 2007b), UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Presiden-RI, 2007a), UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Presiden-RI, 2007c). Kemudian diturunkan pada Peraturan Pemerintah No. 13/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.26/2008 tentang Tata Ruang Nasional Perencanaan, Keputusan Presiden No. 5/2010, Keputusan Presiden No.12/2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Permendag No.31/2010 tentang BNPP. (Kennedy, L.Tobing, L.Toruan, & Tampubolon, 2019)

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Indonesia harus membangun dari pinggir, karena wilayah perbatasan adalah bagian terpenting dari Indonesia. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk melindungi kepentingan nasional, tetapi juga untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global. Namun, kebijakan pembangunan perbatasan bukanlah pekerjaan yang mudah. Kondisi wilayah perbatasan antar negara di beberapa daerah, masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan infrastruktur wilayah dan kesejahteraan masyarakatnya dan berbagai permasalahan lainnya.

B. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia

Wilayah perbatasan adalah salah satu wilayah strategis dimana di wilayah-wilayah tersebut secara nasional menyangkut kehidupan banyak orang dari berbagai kepentingan, seperti politik, ekonomi, sosial,

budaya, lingkungan, dan pertahanan dan keamanan. Wilayah perbatasan Indonesia mencakup wilayah di darat, di lautan, dan di udara yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Wilayah Indonesia dibatasi oleh sepuluh negara, baik darat maupun laut.

Wilayah daratan Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, dengan batas daratan keseluruhan 2.914,1 km. Sedangkan wilayah laut Indonesia dibatasi oleh sepuluh negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Vietnam, Thailand, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. (BNPP-RI, 2011)

Dari perspektif pembangunan, pengembangan daerah perbatasan masih lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal, dimana fasilitas dan infrastruktur sosial dan ekonominya masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah ini umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan, bahkan di beberapa daerah yang berbatasan dengan Negara tetangga, masyarakatnya cenderung berorientasi ke negara tetangga dalam hal layanan sosial dan ekonomi. (dsfindonesia, 2011)

Pengelolaan daerah perbatasan dilakukan oleh di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Peraturan No.1/2011, No.2/2011 dan No.1/2015 yang mengkoordinasikan berbagai departemen/lembaga terkait baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Koordinasi kelembagaan BNPP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No.12/2010. Kepala BNPP (Menteri Dalam Negeri) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang, diantaranya menteri, kepala lembaga

pemerintah non-kementerian, dan lainnya serta pejabat dari lembaga pemerintah, daerah dan non-pemerintah sesuai kebutuhan. (BNPP-RI, 2015)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPP berkoordinasi dengan badan-badan pengelola perbatasan di tingkat daerah. Koordinasi antara BNPP dan badan pengelola perbatasan daerah meliputi bimbingan, fasilitasi, dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan-badan pengelola perbatasan di daerah dikoordinasikan oleh gubernur dalam posisinya sebagai perwakilan dari pemerintah dan anggota BNPP. Prosedur untuk hubungan kerja BNPP dengan badan pengelola perbatasan di daerah diatur oleh Kepala BNPP. (BNPP-RI, 2015)

Dalam mengembangkan daerah perbatasan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) ditentukan. PKSN adalah daerah perkotaan yang bertugas mendorong pengembangan wilayah perbatasan negara. Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk kegiatan layanan lintas batas antarnegara.

Lokasi Prioritas (Lokpri) merupakan kecamatan di wilayah perbatasan darat dan laut dalam Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP). Penyusunan Rencana Induk Lokpri mempertimbangkan berbagai kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, dan didasarkan pada proses mengumpulkan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Perencanaan Lokpri ini diharapkan dapat memberikan arah bagi pengembangan kawasan perbatasan secara

komprehensif dan menjadi masukan bagi proses kebijakan pengembangan wilayah perbatasan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Dengan demikian terbentuk kebijakan pengelolaan perbatasan yang terintegrasi dengan baik. (dsfindonesia, 2011)

Masalah yang signifikan dari perbatasan adalah rentannya pertahanan dan keamanan di perbatasan, keterisoliran wilayah, pengelolaan sumber daya alam yang masih kurang optimal, serta rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pengembangan perbatasan perlu menggunakan pendekatan kesejahteraan (*welfare*), keamanan (*security*) dan lingkungan (*sustainability environment*).

Kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa dukungan keamanan yang baik. Namun pengelolaan perbatasan tidak hanya terfokus pada keamanan negara, tetapi juga keamanan manusia dalam satu kesatuan yang utuh sebagai keamanan nasional. Sebaliknya, keamanan di semua aspek tidak dapat dicapai tanpa kesejahteraan sosial melalui pertumbuhan ekonomi. Untuk membantu kesejahteraan, TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat perbatasan dalam mengatasi masalah sosial yang mereka hadapi, seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, masalah terutama adalah tidak tersedianya kecukupan dana.

Masalah keamanan yang dihadapi di daerah perbatasan bukan lagi berupa ancaman militer dalam bentuk invasi atau infiltrasi dari luar negeri, tetapi berupa kejahatan biasa, seperti penyelundupan barang dan penyeberangan perbatasan secara ilegal, atau sengketa tanah karena tidak disepakatinya beberapa segmen perbatasan

oleh kedua negara, serta pelanggaran perbatasan oleh petugas keamanan sebagai akibat belum adanya kesepakatan tersebut. Dengan demikian penanganan masalah ini juga membutuhkan keahlian polisi dan keahlian non-militer lainnya, serta harus melibatkan pihak lain dengan wewenang dan kompetensi yang sesuai.

Masalah lingkungan adalah hal penting yang harus dihadapi juga di daerah perbatasan, terutama di perbatasan laut. Hilangnya pulau, perusakan hutan bakau, harus dihindari karena akan mempengaruhi batas-batas NKRI. Masalah utama yang dihadapi adalah tingginya biaya pemantauan lingkungan karena lingkaran pulau, garis pantai dan laut yang luas. Kendala lain adalah kurangnya dana yang harus disiapkan untuk mengantisipasi kerusakan langsung oleh alam. Disamping itu, respon tidak dapat dilakukan dengan cepat karena menunggu penganggaran dari pemerintah daerah.

C. Contoh Kasus: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (NTT)

(BNPP-RI, 2015)

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beribukota di Kupang yang memiliki 566 kepulauan. Luas daratan yang dimiliki sekitar 47.396 km² dan lautan 200.000 km². Wilayah ini terletak antara 8°-12° S dan 118°-125° BT. Di utara, provinsi NTT berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Timor Leste, di selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Perbatasan Provinsi NTT dengan Timor Leste di darat secara keseluruhan memiliki panjang 268,8 km.

Secara administratif, wilayah perbatasan darat mencakup 4 (empat) kabupaten dan berada dalam 2 (dua) sektor, yaitu: (BNPP-RI, 2015)

- Bagian timur (Kabupaten Belu, dan Kabupaten pemekarannya, yaitu Kabupaten Malaka, yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalina di Timor Leste) sepanjang 149,9 km dari Mota Ain di utara (Kabupaten Belu) ke Mota Masin (Kabupaten malaka) di selatan,
- Bagian barat (Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara (TTU)) berbatasan langsung dengan Kabupaten Oecussi, yang merupakan daerah kantong dengan panjang perbatasan masing-masing 15,2 km dan panjang 114,9 km. Perbatasan TTU terletak di Wini dan Napan.



Sumber: BNPP (BNPP-RI, 2015)

Gambar 9.1.: Peta Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste di Pulau Timor

Perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di pulau Timor, merujuk pada kesepakatan antara pemerintah Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan dan PCA 1914, serta kontrak sementara antara Indonesia dan Timor Leste 8 April 2005. Negosiasi perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dimulai pada tahun 2001 dengan pertemuan pertama antara RI-UNTAET (Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timor Lorosae). Batas nasional antara Indonesia dan Timor Leste berjumlah 907 titik koordinat yang ditetapkan dalam Perjanjian Sementara, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Timor Leste pada tanggal 8 Juni 2005 di Dili. Tetapi masih ada beberapa segmen yang belum diselesaikan, dan masih disurvei oleh Tim Survei kedua negara.

Populasi yang menghuni wilayah NTT terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk orang Timor, Rote Ndao, Sabu, Sumba, He long, Flores, Alor, dan lainnya. Setiap suku memiliki gaya budaya yang unik, seperti tarian, bahasa, pakaian, dan aturan adat. Bila dilihat dari segi sosial budaya, mereka memiliki keanekaragaman dalam bentuk seni tradisional, adat budaya, dan agama. Dari sisi sosial-budaya, ada banyak kesamaan budaya antara masyarakat Indonesia dan RDTL, karena secara umum mereka terdiri dari satu keluarga dan memiliki bahasa yang sama, yaitu Tetun.

Pertanian dan perkebunan lahan kering mendominasi kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Beberapa komoditas yang dihasilkan diantaranya jambu mete, kelapa, kemiri,

cengkeh, vanili, kapas, lada, dan pala. Aktivitas ekonomi khas yang terjadi di wilayah perbatasan negara adalah perdagangan lintas batas. Sebagian besar aktivitas perdagangan lintas batas adalah berupa kebutuhan peralatan rumah tangga dan makanan yang tersedia, seperti di Atambua, ibukota Kabupaten Belu. Aktivitas lintas batas lainnya adalah kunjungan antar keluarga, karena banyak pengungsi dari Timor Leste masih tinggal di wilayah Atambua. Sementara orang Indonesia yang berkunjung ke Timor Leste melakukan perdagangan pangan dan komoditas lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste.

Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste masih rendah. Distribusi sarana dan prasarana pendidikan masih belum menjangkau desa-desa, terutama yang terletak pada jarak yang jauh atau terpisah di pedalaman. Dari segi kesehatan, secara umum belum berkembang, karena rendahnya pemahaman tentang kesehatan dan pencegahan penyakit, serta terbatasnya jumlah petugas kesehatan.

Pengelolaan perbatasan di Indonesia, hingga saat ini, masih terkendala oleh beberapa isu strategis, seperti pengelolaan perbatasan negara dan pengembangan wilayah perbatasan. Perbatasan Negara adalah wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga, di darat, laut dan diudara. Batas-batas ditentukan oleh fungsi pertahanan dan keamanan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Daerah perbatasan secara umum belum mendapat perhatian yang

proporsional. Seperti perubahan batas teritorial, penyelundupan barang dan jasa, serta krisis transnasional. Kondisi ekonomi umum di wilayah perbatasan dimana lokasinya yang relatif jauh dengan tingkat rendah aksesibilitas, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya masih rendah, kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat perbatasan juga rendah, dan kelangkaan informasi tentang pembangunan masyarakat di daerah perbatasan. (Pemprov-NTT, 2013)

Sepanjang perbatasan RI-RDTL, terdapat pos-pos yang ditempati oleh anggota TNI sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas). Setiap tahun Pamtas melaporkan tentang batas wilayah dan keamanan lintas batas, dan kegiatan sosial bersama dengan masyarakat setempat. Umumnya, patroli perbatasan dilakukan sebulan sekali, dan setiap beberapa bulan melakukan kegiatan patroli bersama dengan petugas keamanan RDTL (*UPF, Unido Patruofomento Fronteira*). Gugus Tugas dalam mengamankan perbatasan RI-RDTL, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran batas-batas negara, mencegah penyelundupan, dan pasar gelap, termasuk menjaga penanda perbatasan. Ada sekitar 650 tentara ditempatkan di pos perbatasan. Dari 38 pos keamanan perbatasan, 25 ada di Kabupaten Belu dan Malaka, dan sisanya di Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Oecusie di Timor Leste. (BNPP-RI, 2015) (Susetio, 2014)

Hingga saat ini ada sekitar 4% dari semua batas tanah yang masih bermasalah karena tidak ada kesepakatan bersama antara RI- RDTL. Ada dua hal utama yang menyebabkan masalah penetapan batas tanah

antara RI dan Timor Leste yang masih berlarut-larut, yaitu karena faktor teknis (interpretasi yang berbeda dari aturan yang digunakan sebagai referensi untuk menentukan batas-batas) dan faktor non-teknis seperti penolakan masyarakat setempat pada penetapan batas yang telah ditentukan, dan pengambilan sumber daya alam oleh komunitas lokal di sekitar wilayah perbatasan, karena alasan historis, ekonomi dan sosial budaya. (BNPP-RI, 2015)

D. Pengembangan Pos Lintas Batas Negara dan Pariwisata Perbatasan di Atambua, Nusa Tenggara Timur

Fasilitas dan infrastruktur transportasi darat ke perbatasan Timor Leste cukup baik, sehingga akses kedua belah pihak untuk saling mengunjungi relatif mudah dan cepat. Kondisi jalan dari Atambua, ibukota Belu, ke gerbang perbatasan, memiliki kualitas yang cukup sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam satu setengah jam. Ini bisa dimengerti karena dua daerah di NTT dan Timor Leste sebelumnya adalah dua provinsi tetangga, sementara jaringan udara dipenuhi oleh maskapai yang memiliki penerbangan reguler dari Bali ke Dili. Kegiatan lintas batas yang sering terjadi adalah lintas batas tradisional melalui jalur akses yang digunakan sebagai jalan biasa ketika Timor Leste masih menjadi salah satu provinsi di Indonesia.

Salah satu dampak dari pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan adalah dapat mendukung berbagai kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan lintas batas dan perdagangan. Biaya perdagangan internasional dan biaya distribusi lokal sangat besar dan bersama-sama

mendominasi biaya produksi marginal. Oleh karena itu, meningkatkan infrastruktur benar-benar dapat mengurangi biaya perdagangan antarnegara. (Anderson & Van Wincoop, 2004)

Awalnya perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur belum optimal, karena: Tidak dianggap ekonomis sebab lokasinya jauh dari pusat pertumbuhan dan populasinya sangat kecil; Infrastruktur ekonominya seperti pasar, tidak memadai; Kurangnya fasilitas dan dukungan sosial-ekonomi dengan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia lokal dalam mengelola sumber daya alam dengan akses hasil yang terbatas sehingga masyarakatnya berpenghasilan rendah; Lemahnya aspek modal dan perdagangan; Pemahaman perjanjian dan ketentuan perdagangan Lintas Batas masih rendah dengan dukungan infrastruktur yang terbatas; Tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan yang masih rendah sehingga dapat mengundang kerentanan di masa depan. (Bara Lay & Wahyono, 2018)

Namun, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan program Nawacita nya, pembangunan daerah perbatasan menjadi prioritas karena pentingnya nilai strategis dari daerah perbatasan, baik secara nasional maupun internasional. Realisasi konektivitas dan aksesibilitas yang baik merupakan faktor penting dalam mengembangkan daerah perbatasan. Mengingat juga bahwa wilayah NTT berbatasan langsung dengan negara lain yang memiliki potensi untuk berkembang pesat.

Oleh karena itu, sebagai pintu gerbang kegiatan lintas batas baik dari mobilitas penduduk maupun barang antarnegara yang cukup tinggi, Pos Lintas Batas Nasional

(PLBN) menjadi penting untuk dikembangkan, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia melakukan kegiatan penataan wilayah lintas batas. PLBN secara resmi menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan antarnegara, dan sangat berdampak pada meningkatnya dinamika kegiatan lintas negara.

Salah satu pengembangan utama PLBN antara Indonesia dan Timor Leste adalah PLBN Motaain di desa Silawan, Kabupaten Belu NTT. Mengembangkan PLBN Motaain merupakan salah satu upaya untuk mendukung pengembangan daerah perbatasan sesuai dampak potensial tentang perkembangan kegiatan perdagangan antar negara dan di Belu, Pengembangan PLBN Motaain bertujuan, selain meningkatkan martabat bangsa Indonesia juga berusaha meningkatkan ekonomi daerah perbatasan, khususnya sektor perdagangan. Hal ini tidak hanya berdampak di wilayah perbatasan Motaain, tetapi juga berdampak pada peningkatan perekonomian Kabupaten Belu. Perkembangan Motaain PLBN berdampak luas baik mikro maupun makro. Seperti pada kegiatan perdagangan, yang meliputi biaya perdagangan, intensitas perdagangan, pendapatan kapita dan pertumbuhan ekonomi. Diantaranya adalah biaya perdagangan menjadi lebih murah, intensitas perdagangan meningkat, dan pendapatan perkapita masyarakat meningkat. (Bara Lay & Wahyono, 2018)

Keberadaan PLBN Motaain sekarang lebih strategis. Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, PLBN Motaain telah menjadi ikon baru Indonesia. Tidak

hanya berfungsi sebagai pos lintas batas, PLBN dapat menjadi salah satu tujuan wisata baru. Rencana Pembangunan PLBN Motaain juga menekankan pentingnya mengembangkan pariwisata di perbatasan (*border tourism*) untuk meningkatkan masuknya wisatawan. Wisata perbatasan harus dikembangkan, karena jumlah kunjungan wisatawan perbatasan ini sangat besar di dunia. Seperti negara-negara Eropa, jumlah kunjungan wisatanya besar karena didukung oleh pariwisata perbatasan.

Untuk pengembangan pariwisata di PLBN Motaain, sudah tidak ada halangan untuk aksesibilitas. Yang perlu didorong adalah adanya even-even untuk berbagai atraksi yang menarik banyak wisatawan, terutama wisatawan dari Timor Leste. Salah satu atraksi yang dapat dilakukan adalah menawarkan wisata belanja kepada wisatawan dari Timor Leste dengan barang-barang yang lebih lengkap atau lebih murah daripada yang ada di Timor Leste. PLBN ini diharapkan tidak hanya sebagai pintu masuk, tetapi juga sebagai tujuan wisata. Jika PLBN Motaain menjadi tujuan belanja, orang Timor Leste akan sering berbelanja di sana, karena itu perlu diadakan wisata akhir pekan untuk wisatawan dari Timor Leste dan juga dari Kabupaten Belu. Semakin banyak orang yang berasal dari kedua negara, pasar di PLBN akan semakin hidup, sehingga menjadi daya tarik bagi negara-negara luar negeri. (Antaraneews, 2018)

Di Atambua, PLBN Motaain sering mengadakan *Festival Wonderful Indonesia* pada hari-hari pasar yang jatuh pada hari Selasa dan Rabu. Acara bertujuan ini untuk mendorong kunjungan wisatawan dari Timor

Leste ke Indonesia, serta untuk mendorong perekonomian rakyat di perbatasan. Konsep yang ditawarkan bahkan lebih beragam, seperti zumba, *live music*, bazar, *game* dan *gimmicks*. Bazar itu sendiri penuh dengan berbagai produk seperti kuliner lokal, tenun kain, dan sebagainya. The Indonesia Festival ini sengaja diadakan secara rutin di perbatasan NTT. Dengan demikian PLBN Motaain diharapkan menjadi lebih hidup sebagai tujuan wisata. Di samping itu, diharapkan acara ini akan menjadi ruang bagi pergerakan ekonomi di perbatasan. (Okezone, 2019)

Pada saat ini PLBN di berbagai perbatasan telah banyak berubah. Wajahnya semakin bersinar dengan gedung-gedung yang bagus, tidak kalah dengan negara tetangga. Fasilitas semakin membaik dengan berbagai taman indah yang menghiasinya. Kini, di PLBN Motaain telah selesai pembangunan untuk pasar dan *food court* yang akan diisi pedagang dan masyarakat sekitar. Perkembangan didukung dengan infrastruktur yang semakin baik, jalan raya dari PLBN Motaain ke ibukota kabupaten bagus dan lancar, seperti halnya jalan dari Kupang ke Atambua. (Okezone, 2019)

Sampai saat ini, sudah ada 2 penerbangan dari Jakarta ke Atambua setiap hari. Di perbatasan wisatawan dapat lebih mudah bergerak, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari negara tetangga. Pariwisata membutuhkan kedekatan, baik kedekatan budaya serta kedekatan jarak. Setiap gerakan dari orang diharapkan membuat pergerakan ekonomi, pergerakan barang dan jasa, serta bahwa pariwisata juga akan bergerak. Jika PLBN semakin ramai oleh turis, tentu saja akan

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat menuju arah yang lebih baik. (Okezone, 2019)

Berikut beberapa gambar situasi dari PLBN Motaain.



Gambar 9.2: Halaman Masuk PLBN Motaain (Sumber: koleksi sendiri)



Gambar 9.3: *Custom* dan Imigrasi di PLBN Motaain (Sumber: koleksi sendiri)



Gambar 9.4: Halaman PLBN Motaain (Sumber: koleksi sendiri)



Gambar 9.5: Pasar yang akan Dibuka pada PLBN Motaain (Sumber: koleksi sendiri)



Gambar 9.6: Rumah/Apartemen Dinas PLBN Motaain (Sumber: koleksi sendiri)



Gambar 9.7: Acara Festival *Wonderful Indonesia* dan Bazar (Sumber: koleksi sendiri)

E. Kesimpulan

Banyak masalah yang dihadapi oleh wilayah perbatasan antarnegara di Indonesia. Pembangunan perlu dilakukan dengan memprioritaskan pendekatan

kesejahteraan, lingkungan dan keamanan. Masalah-masalah signifikan dari perbatasan antar negara di Indonesia adalah daerah yang terisolasi, kerentanan terhadap pertahanan dan keamanan di perbatasan, pengelolaan sumber daya alam yang masih kurang optimal, dan rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Isu strategis mengenai batas wilayah Indonesia-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama adalah menyangkut kondisi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan, kondisi infrastruktur, populasi, sosial dan budaya.

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan daerah perbatasan merupakan prioritas karena memiliki nilai strategis baik nasional maupun internasional. Sebagai pintu gerbang dengan aktifitas lintas batas, baik mobilitas penduduk maupun barang antarnegara yang cukup tinggi, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi penting untuk dikembangkan. Pengembangan PLBN Motaain di Desa Silawan, Kabupaten Belu NTT menekankan kemudahan perlintasan manusia antarnegara, juga pengembangan pariwisata di perbatasan (*border tourism*). Dengan semakin berkembangnya pariwisata di perbatasan, diharapkan perekonomian masyarakat akan bertumbuh. Perkembangan daerah perbatasan ini didukung dengan infrastruktur yang semakin baik, jalan raya dari PLBN Motaain ke ibukota kabupaten telah bagus dan halus, demikian juga jalan dari Kupang ke Atambua. Melalui perbatasan ini diharapkan wisatawan asing dapat lebih mudah bergerak dan semakin banyak berkunjung, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari negara tetangga, Timor Leste.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E., & Van Wincoop, E. (2004). Trade costs. *Journal of Economic Literature*, 42(3), 691-751. <https://doi.org/10.1257/0022051042177649>
- Antaranews. (2018, October 4). Menpar: Pariwisata Perbatasan Harus Dikembangkan. *Kupang.Antaranews.Com*. Retrieved from <https://kupang.antaranews.com/berita/9252/menpar-pariwisata-perbatasan-harus-dikembangkan>, Kamis, 4 Oktober 2018
- Bara Lay, J. R. B., & Wahyono, H. (2018). Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Pada Kawasan Perbatasan RI-RDTL Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 14(1), 29. <https://doi.org/10.14710/pwk.v14i1.18246>
- BNPP-RI. *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025*. (2011).
- Bnpp-Ri. *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019*. (2015).
- dsfindonesia. (2011). *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan*. Jakarta.
- Kennedy, P. S. J., L.Tobing, S. J., L.Toruan, R., & Tampubolon, E. (2019). Analisis masalah pengelolaan kawasan perbatasan antara provinsi maluku dan negara timor leste. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019*, 2, 1-6.
- Okezone. (2019, September 26). Festival Wonderful Indonesia di Atambua Punya Strategi Baru. *News.Okezone.Com*. Retrieved from

<https://news.okezone.com/read/2019/09/26/1/2109558/festival-wonderful-indonesia-di-atambua-punya-strategi-baru>

- Pemprov-NTT. (2013). *Laporan Ringkasan: Penyusunan Kajian Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan*. Kupang.
- Presiden-RI. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*. (2007).
- Presiden-RI. *UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. (2007).
- Presiden-RI. *UU No. 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. (2007).
- Presiden-RI. *UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara*. (2008).
- Susetio, F. A. (2014). *Seri Tentara di Perbatasan, Prajurit Wira Yudha: Kalahkan" Musuh" di Perbatasan Atambua (Cetakan Pe)*. Atambua: Yonif 742/Satria Wira Yudha.

~oOo~

Biodata Singkat



Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy S.T., S.E., M.Si., M.S.E., lahir di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1974. Ia menyelesaikan kuliah pada Institut Teknologi Bandung (S1), Universitas Padjadjaran (S1), dan Universitas Indonesia (S2 dan S3). Mayor keahlian doktoralnya adalah ekonomi, terutama ilmu

ekonomi pertahanan setelah mempertahankan disertasi dengan judul “Kebijakan Anggaran Pertahanan dan Pengaruhnya pada Perekonomian Nasional”. Menjadi Dosen Tetap di Universitas Kristen Indonesia sejak tahun 2012 sampai sekarang. Dikenal sebagai Peneliti Perbatasan dan kerap menjadi Nara Sumber dan Tenaga Ahli. ###

Membangun Peradaban Berbasis Pariwisata

Buku ini terdiri dari 12 bab yang membahas tentang bagaimana pengaruh sektor kepariwisataan bagi pembangunan di Indonesia. Setiap bab memiliki keunikan tersendiri mendalam dan tajam tentang berbagai proses baik dalam level mikro, meso dan makro.

Bab 1 berbicara tentang bagaimana menggali potensi wisata berbasis spasial. Pada bab 2, membahas tentang bagaimana peran masyarakat dalam membangun desa wisata. Indonesia sebagai negara agamis, menjunjung tinggi nilai agama, digambarkan dalam bab 3 dengan judul *Isu, Konsep, dan Implementasi Bisnis Wisata Halal*. Saat bab 4, pembaca dihantarkan pada isi terkait dengan Tradisi Perkawinan Adat Bangka sebagai salah satu Potensi Daya Tarik Wisata. Ulasan tentang teknis dan metode partisipatif diungkapkan dalam bab 5, lewat judul *Asset Based Community Development (ABCD)* dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. Bab 6 berbicara tentang Pengembangan Desa Wisata Berbasis Adat dan Budaya. Saatnya waktu virtual, dibahas pada bab 7, *Virtual Tour* sebagai Alternatif Wisata. Bab 8 berbicara tentang *Storytelling* dalam penyajian kemasan produk desa wisata. Indonesia dikelilingi banyak negara, dibahas secara mendalam pada bab 9, wajah baru perbatasan Indonesia. Bab 10 tentang perencanaan penerapan program *cleanliness, health and safety (CHS)* pada destinasi wisata dalam new normal di Indonesia. Bab 11, tentang Penguatan Tata Kelola Pariwisata Kabupaten Bangka dalam Perspektif *Collaborative Governance*.

ISBN 9 78-623-6906-00-2



9 786236 906002